

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN HASIL**

#### **A. Media Sosial dan Propaganda**

##### **1. Aktivis HTI/ISIS Di Media Sosial**

Gerakan keagamaan semakin meluas bersamaan dengan semakin intensifnya penetrasi media sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial mampu membawa emosi dan kedekatan psikologis para penggunanya sehingga seakan-akan terikat satu sama lain dengan pengguna lainnya. Ini yang menjadikan media sosial sebagai sarana berkomunikasi di dunia. Perkembangan jejaring sosial yang begitu pesat yang dapat menghubungkan semua orang di seluruh dunia tanpa ada batas ruang maupun waktu.

Isis dan HTI sama-sama telah menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan berbagai macam ajakan dan pengaruh keagamaan. Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. Perkembangan ISIS menjadi gerakan transnasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi via internet dengan efektif.<sup>1</sup>

ISIS menggunakan setiap platform media sosial yang ada untuk melancarkan propaganda dan merekrut anggota baru. ISIS setiap harinya mengirimkan 90.000 pesan digital di akun media sosial mereka. Termasuk

---

<sup>1</sup> Angga Teguh Prastyo, *Media Sosial Dan Perkembangan Aliran Keagamaan Pasca Munculnya Gerakan Isis*, FITK UIN Maliki Malang 2015, Malang. hlm.8

*Twitter*, video di *Youtube*, postingan di *Facebook*, *blog* dan sejenisnya. Sementara masyarakat masih berdebat bahwa percuma melawan propaganda ini, ISIS setiap hari mendapatkan simpatisan dan anggota baru. J.M. Berger, seorang peneliti di Brookings Institution, memberikan kesaksian di Amerika Serikat terkait penggunaan media sosial oleh ISIS. Penelitian ini didanai dan difasilitasi oleh *Google*.

Berger bersama koleganya menggunakan sistem yang mengidentifikasi dan melacak siapa saja pendukung ISIS di media sosial. Hasil penelitian Berger semakin membuka mata tentang agresivitas ISIS dalam penggunaan media sosial. ISIS sebelumnya disebut melancarkan 90.000 pesan sehari. Namun, Berger menyebut angka paling ideal adalah 200.000 per hari. Angka itu termasuk berasal dari twitter, postingan video, dan blog. Kebanyakan dari mereka berasal dari Iraq dan Suriah. Berger juga menyebut bahwa ISIS menggunakan hastag tertentu untuk mengidentifikasi pendukung mereka. Setelah itu mereka akan merekrut dan mengajak mereka untuk bergabung.<sup>2</sup>

HTI yang memiliki cita-cita menyebarkan paham Khilafa keseluruhan penjuru dunia menjadikan kemajuan teknologi tersebut sebagai momentum dan alat bagi HTI dalam mensyiarkan Khilafah. Adapun media sosial yang dipakai HTI dalam menyebarkan dakwahnya yaitu, situs <http://hizbut.tahrir.or.id>. Masyarakat dapat mengakses pengetahuan tentang HTI dari situs tersebut, di dalamnya terdapat berbagai hal tentang HTI. Namun situs tersebut sudah tidak bisa diakses lagi (*dibanned*).

---

<sup>2</sup><https://tirto.id/propaganda-efektif-isis-di-jejaring-sosial-bCpH> (diakses 19 September 2019)

Media sosial yang selanjutnya adalah youtube, dengan nama HTI Chanel, di youtube ini menampilkan berbagai video tentang kegiatan HTI di seluruh Indonesia, dan video tentang Khilafah. Kemudian Instagram dengan nama @hizbuttahrird di dalamnya menampilkan beberapa foto tentang HTI, follower dalam instagram HTI mencapai 88 ribu dan jumlah postingannya sebanyak 1.025 postingan, namun kemudian sudah tidak bisa diakses lagi, namun muncul akun-akun lain yang ramai menyuarakan

HTI dan Khilafah Indonesia misalnya @Indonesiabertauhidofficial yang jumlah pengikutnya mencapai 1,4Juta, @iqomic dengan jumlah pengikut 332 ribu orang, @Mozaik\_Islam dengan pengikut 1,1 Juta orang dan masih banyak lainnya.

Di Twitter dengan nama @hizbuttahrirID dengan jumlah follower sekitar 45 ribu dengan kurang lebih 28 ribu postingan. Di facebook dengan nama @HTIID Hizbut Tahrir Indonesia total akun yang mengikuti facebook HTI mencapai 115.110 orang. Di dalamnya hampir semua sama dengan media yang lainnya yaitu menampilkan tentang HTI, baik berupa foto video dan link tentang HTI.

Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan *Facebooknya* memiliki dualitas identitas. Identitas pertama halaman *Facebook* Hizbut Tahrir Indonesia yang anti demokrasi dan berusaha membentuk negara Islam. Negara Islam dalam hal ini adalah suatu wilayah di bawah kedaulatan Islam yang diperintah oleh seorang Khilafah berdasarkan hukum Islam dimana penganut agama lain bisa hidup berdampingan dengan memiliki hak dan kebebasan untuk menganut agamanya.

Identitas kedua mereka adalah sebagai masyarakat Indonesia biasa yang mengikuti proses pemerintahan di Indonesia

Media sosial tersebut diatas dijadikan oleh HTI sebagai tempat dakwah untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam Khususnya tentang Khilafah. Sebagaimana kita ketahui media sosial adalah tempat paling banyak diakses oleh manusia saat ini, sehingga sangat relevan untuk di jadikan tempat dakwah. Seiring dengan penggunaan media sosial yang begitu pesat bahkan tempat untuk beraktivitas setiap hari. Hampir semua media HTI tersebut diatas sudah tidak bisa diakses lagi.

## **2. Media Sosial Sebagai Sarana Propaganda**

Perkembangan teknologi dalam komunikasi berpengaruh dalam kehidupan manusia baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan juga politik. Bidang politik cukup banyak terpengaruh oleh teknologi komunikasi sendiri. Komunikasi sangat penting dan diperlukan dalam politik dan merupakan salah satu bagian dari kegiatan politik sendiri. Teknologi berkembang dengan cukup pesat dan menimbulkan bermunculannya begitu banyak media baru yang memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat, Salah satu bidang yang cukup banyak sangat bergantung dengan teknologi komunikasi adalah bidang politik. Karena di dalam bidang politik ini komunikasi politik sangat penting dalam politik. Mengenai jenis-jenisnya sendiri, Menurut Kaplan dan Haenlein<sup>3</sup> ada enam jenis media sosial:

---

<sup>3</sup> Rety Palupi, *Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Alat Propaganda*, Jurnal Bina Sarana Informatika, Jakarta. hlm. 2

- a. Proyek Kolaborasi Website mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun memindahkan konten-konten yang ada di website ini. Contohnya wikipedia.
- b. Blog dan microblog  
Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curahan hati (Curhat) ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya *Twitter, Blogspot, Tumblr, Path* dan lain-lain.
- c. Konten Para Pengguna dari pengguna website ini saling berbagi konten-konten media, baik seperti video, *ebook*, gambar dan lain-lain. Contohnya *Youtube*.
- d. Situs jejaring sosial  
Aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh Facebook, Path, Instagram dan lain-lain.
- e. Virtual game world  
Dunia virtual dimana mereplikasikan lingkungan 3D, di mana pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata, contohnya *game online*.
- f. Virtual social world. Dunia virtual yang di mana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world,

berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Social World* lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya *second life*.

Media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi.<sup>4</sup>

Indonesia menjadi salah satu 'pasar utama' yang dibidik perusahaan-perusahaan media sosial global dalam rangka mereguk kepentingan bisnis dan pengaruh. Sebut saja platform *Facebook* yang hingga akhir tahun lalu diperkirakan memiliki pengguna aktif hingga 71,9 juta, *Instagram* sebanyak 58,1 juta, dan media sosial penyedia ruang tayangan video, *Youtube* mencapai 50,8 juta. Ditambah penggunaan platform mesin pencari (*search engine*) semisal *Google* yang masih bertengger di puncak teratas konsumsi internet di Indonesia dengan jumlah pengguna hingga 92,1 juta.<sup>5</sup>

Namun dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tidak seiring dengan terwujudnya harapan bahwa internet dapat menjadi sarana untuk

---

<sup>4</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media 2015. hlm.11

<sup>5</sup> Asosiasi Data Penyelenggara Internet Indonesia, <https://apjii.or.id/content/read/104/398/BULETIN-APJII-EDISI-33---Januari-2019> (diakses 19 Juli 2019)

menciptakan iklim demokrasi yang kondusif itu tidak pernah benar-benar terjadi. Kenyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Vivian bahwa keberadaan internet sebagai media massa yang demokratis dikarenakan banyak orang yang dapat menciptakan isinya sendiri-sendiri, tidak terlepas dari kelemahan. Kelemahannya itu pada ketiadaan batasan sebagaimana di media tradisional, sehingga konten ataupun isi pesannya tidak terjamin tingkat akurasi. Disebabkan ketiadaan batasan itulah maka internet penuh dengan informasi yang tidak akurat.<sup>6</sup>

Kenyataan tersebut setidaknya terlihat dari pemanfaatan media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *Instagram* oleh para penggunanya yang belakangan ini cenderung bebas tanpa batas dengan status berisi pesan atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. *Facebook* juga lebih dominan dimanfaatkan sebagai ajang untuk membangun dan menyebarkan pesan maupun wacana-wacana kebencian. Pesan dan wacana kebencian itu datang silih berganti tanpa henti karena terus diproduksi dan direproduksi dengan cara dishare kepada sebanyak-banyaknya pengguna lainnya, lalu dikomentari dengan penuh kebencian pula. Untuk memperkuat argumentasi kebencian, tidak sedikit di antara netizen melakukan teknik agitasi dan propaganda dengan membuat kabar dan berita hoax atau menautkan statusnya ke situs-situs tertentu yang memuat kabar dan berita hoax dimaksud.

Ironisnya, satu persoalan, akibat terus diwacanakan telah menimbulkan banyak persoalan ikutan yang menimbulkan wacana-wacana kebencian lain

---

<sup>6</sup> Vivian, John, Teori Komunikasi Massa (Edisi Terjemahan). Jakarta: Prenada Media Group 2008., hlm.277-278.

sehingga banyak pihak mengkhawatirkan bahwa situasi panas di ruang maya itu akan berimbas di dunia nyata, sehingga menimbulkan friksi sosial baik antar kekuatan politik, ras, maupun agama, lalu berujung pada situasi disintegrasi.

Sedangkan istilah propaganda identik dengan aktivitas komunikasi yang berupaya memanipulasi psikologi khalayak. Pada praktiknya propaganda mengelaborasi pesan untuk memperoleh pengaruh secara persuasif yang digunakan guna menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-individu-individu yang dipersatukan melalui manipulasi psikologis. Saat ini seiring dengan keberadaan teknologi komunikasi yang begitu canggih dan dianggap sangat efektif, media massa lebih utamanya media berbasis internet seperti media sosial banyak dijadikan sebagai saluran untuk membangun propaganda oleh berbagai pihak.

Harold D. Lasswell<sup>7</sup> menyatakan bahwa propaganda semata merujuk pada kontrol opini, dengan symbol-simbol penting, atau berbicara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Ia juga memberi definisi propaganda sebagai teknik memengaruhi tindakan manusia.

### **3. Bentuk Propaganda Melalui Media Sosial.**

#### *1. Facebook*

Bentuk Propaganda yang paling menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah Propaganda berbau politik mengenai kasus Basuki Tjahja Purno (Ahok). Seperti diwartakan oleh berbagai media, polemik tentang kasus dugaan penistaan

---

<sup>7</sup> Gun Gun Heryanto, dan Shulhan Rumar. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2013. hlm.76



agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berawal saat berlangsung dialog dengan warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Dalam dialognya Ahok sempat melontarkan tentang pencalonannya kembali sebagai gubernur dalam Pilkada DKI 2017 dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih siapa pun calon gubernurnya seraya menyinggung tentang surat al-Maidah ayat 51. Ungkapan Ahok menjadi polemik setelah videonya diadit dan diposting oleh seorang bernama Buni Yani. Ia mengedit isi video tersebut dengan menghilangkan kata-kata 'pakai' dari "*Karena dibohongin pakai surat al-Maidah 51....*" menjadi "*Karena dibohongin Surat al-Maidah 51....*" dan mempostingnya di Facebook.

Pasca itulah pernyataan Ahok menjadi viral di FB karena terus dibagikan oleh para pengguna internet hingga menimbulkan pro-kontra dan kegaduhan yang luar biasa di ruang maya. Teknik propaganda yang ditemukan peneliti dalam kasus ini adalah Propaganda dengan teknik Umpatan/Julukan/*Name Calling* dimana masing-masing kelompok netizen saling memberi julukan yang bersifat umpatan dan hujatan terhadap pihak yang tertentu dengan sebutan seperti, China, sipit, kafir, anti-pribumi, PKI, komunis, kristen, kafir, kelompok intoleran, massa bayaran, preman, kelompok anti demokrasi, kelompok intoleran, dan dan masih banyak lagi.

Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah akun facebook baik atas nama pribadi maupun akun atas nama grup dan komunitas, polemik tentang dugaan penistaan agama itu pada akhirnya telah menimbulkan wacana-wacana kebencian yang mengerucut kepada kebencian agama, ras, dan negara.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam *cyberwar* tersebut aktif memproduksi dan mereproduksi wacana dan simbol-simbol kebencian itu baik melalui kata-kata, foto, meme, video, termasuk tautan berita/wacana dari situs-situs online yang berafiliasi dengan kepentingan masing-masing pihak. Di sisi lain dengan wacana-wacananya itu mereka juga saling mengklaim sebagai pihak yang paling benar dan sama-sama menyatakan diri demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

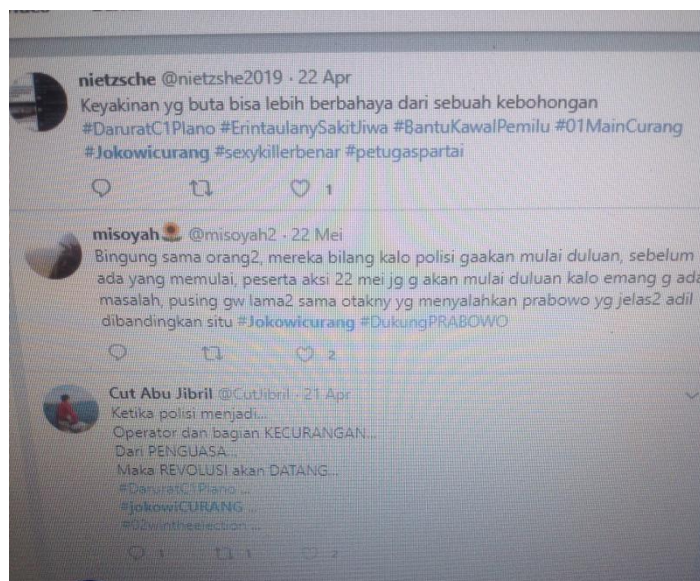
## 2. *Twitter*.

Propaganda melalui *Twitter* dapat ditemukan dalam kegiatan Pemilu 2019 yang baru saja berlangsung. Salah satu bentuk kegiatan politik yang diketahui banyak masyarakat luas adalah kampanye politik. Dalam hal ini kampanye sendiri sudah terbagi dalam beberapa kategori seperti kampanye legislatif, kampanye capres dan juga kampanye dalam pemilu kepala daerah dll. Yang juga sangat menarik untuk diamati adalah pergeseran bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh para calon dalam kampanye. Berikut beberapa bentuk propaganda yang ditemukan pada *twitter* mengenai pemilu 2019.

**Gambar 2.1 Unggahan dari Akun Twitter @Chomarahmed**



**Gambar 2.2 Unggahan dari Akun Twitter @nietzsche**



Bentuk Propaganda diatas apabila dikaitkan Menurut pendapat Jowett dan O'Donell adalah termasuk propaganda hitam adalah propaganda yang berasal dari sumber palsu yang menyebarkan kebohongan, pemalsuan, bahkan penipuan.

Propaganda hitam adalah kebohongan besar termasuk didalamnya segala jenis dari usaha-usaha yang mengandung tipu daya. Propaganda hitam sering disamakan dengan *covert propaganda*, propaganda tertutup, yakni propaganda yang dilancarkan pihak tertentu dengan cara menyembunyikan identitasnya sendiri dengan mengaku berasal dari seseorang atau suatu tempat lain, dengan sumber informasi yang benar. Dalam propaganda hitam, identitas seringkali harus disembunyikan karena memang informasi yang disampaikan penuh dengan distorsi bahkan kebohongan.

Sedangkan menurut Alip Kunandar dalam buku Memahami Propaganda (Metode, Praktik, Analisis) menyebutkan: Propaganda hitam sering kali ditudingkan sebagai propaganda yang bersumber dari pihak lawan. Pada umumnya pihak lawan selalu mengajukan pesan-pesan yang berlawanan atau menantang pesan-pesan dari propagandis. Dalam kampanye, jenis propaganda hitam, selalu disebut *black campaign*, yaitu penyebarluasan pesan untuk merendahkan sumber propaganda, dengan demikian khalayak diajak untuk tidak perlu percaya kepada pihak propagandis.<sup>8</sup>

Sukses tidaknya propaganda hitam, sangat tergantung dari bagaimana propagandis memahami khalayak sarannya dengan melalui berbagai pendekatan, misalnya saja pendekatan budaya, sosial, politik, dan psikologi khalayak sarannya.

---

<sup>8</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014

#### 4. Diskursus Anti Demokrasi di Indonesia

Demokrasi secara konseptual lebih ditekankan pada sumber kekuasaan dibandingkan dengan cara memerintah. Di dunia Barat pada sekitar abad ke -19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lain seperti keinginan liberal. Indonesia pada masa itu dibawah sebuah kekuasaan asing yang di negeri induknya menerapkan demokrasi, tetapi di negeri jajahan tidak demikian. Pada saat ini, Indonesia menerapkan tatanan pemerintahan yang demokratis. Hal ini terbukti adanya Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali untuk meminta suara rakyat dalam menentukan partai politik mana yang dapat memerintah di negeri ini.

Adalah para pemikir-pemikir Yunani kuno yang mencoba mengkongkretkan dan menganalisis secara lebih detil tentang hakikat dari demokrasi. Hal ini adalah karena memang bangsa Yunani yang meninggalkan kebijaksanaan dan pemikiran besar terhadap kebudayaan barat, yang kemudian menguasai dunia sampai saat ini. Dalam hal ini, bangsa Yunani mewariskan *civilisasi Helenisme* kepada dunia Barat, yang kemudian menguasai selama selama ribuan tahun bahkan sampai saat ini. Nilai-nilai penting dalam *civilisasi Helenisme* yang diwariskan langsung dari bangsa Yunani adalah analisis yang berpusat pada masalah manusia, pemikiran dan tujuan keberadaannya, penentuan benar atau salah secara obyektif, dan hubungan antara faktor benar dan salah terhadap kodrat dan institusi kemanusiaan, termasuk bernegara secara benar melalui sistem pemerintahan demokrasi.

Demokrasi di Indonesia, tidak diterima begitu saja. Seiring berjalannya waktu muncul berbagai ormas penolakan yang menjuluki diri mereka sebagai Ormas anti Pancasila dan Demokrasi salah satunya adalah keberadaan ormas Hizbut Tahrir. Untuk mewujudkan suatu negara Khilafah, tentunya Hizbut Tahrir menyebarkan ideologi atau gagasannya ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Banyak gerakan Islam yang menilai Indonesia (terutama Hizbut Tahrir) memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang tidak dimiliki negara-negara muslim lainnya, yang membuatnya berpeluang besar menjadi pelopor kebangkitan Islam di dunia. Kelebihan-kelebihan itu antara lain adalah jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan penduduknya yang dikenal ramah dan terbuka.<sup>9</sup>

Sejumlah ilmuwan politik mengatakan bahwa Indonesia sebagai negeri muslim terbesar belum sepenuhnya berhasil dalam mempraktikkan demokrasi. Oliver Roy, dalam bukunya *The Failure of Political Islam*, berpandangan sinis terhadap eksistensi dan artikulasi “Islam politik” di belahan bumi muslim. Hal senada juga dikatakan oleh Frederic Volpi. Volpi melihat fenomena kemunculan demokrasi di dunia muslim sebagai “pseudo-demokrasi”, yakni “sebuah tatanan politik yang mencoba menyerupai demokrasi liberal tanpa upaya nyata untuk menjadi demokrasi liberal”. Sedangkan Vedi R. Hadiz, menyebut demokrasi muslim seperti terjadi di Indonesia sebagai “demokrasi illiberal”, sejenis demokrasi yang menyamar, dan bukan demokrasi itu sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sejarah Hizbut Tahrir. <http://myquran.org/forum/index.php?topic=73407.0>. Diakses pada 20 Juli 2019.

<sup>10</sup> Ali Maksum, *Telaah Pemikiran Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia*, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya 2012. hlm.3

Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan di dunia melalui pergerakan-pergerakan atau dakwah dengan mengubah pemikiran masyarakat tentang wajibnya mendirikan Khilafah dan menerapkan syariah ditengah ummat manusia. Kehidupan yang berdasarkan hukum Islam ini kembali ingin dihidupkan seperti sistem Khilafah pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun. Sistem perpolitikan pada masa empat sahabat nabi, yakni Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Bin Abi Talib, ini senantiasa menjadi rujukan bagi para pemikir Islam. Sistem Khilafah pada masa ini dianggap paling ideal.<sup>11</sup>

Dalam pandangan HTI, demokrasi berbeda dengan sistem Islam. Apa yang HTI pahami dari demokrasi adalah sejenis pemerintahan yang sekular-kapitalis. Sistem pemerintahan jenis ini semata-mata hanya bersumber dari akal pikiran manusia dan lahir dari peradaban yang bobrok. Penolakan HTI tidak hanya terhadap demokrasi, tapi juga terhadap perangkat yang menyertainya, seperti partai politik, pemilu, dan lembaga perwakilan. Unsur-unsur demokrasi ini dianggap haram hukumnya karena dilaksanakan bukan untuk mengimplementasikan syari'at Islam, tapi hukum sekular yang diputuskan lewat suara mayoritas. Demokrasi oleh HTI dianggap tidak tepat karena mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim. Dalam pandangan HTI, konsepsi tersebut jelas

---

<sup>11</sup> Mujamil Qomar. Fajar Baru Islam Indonesia?. (Bandung: Mizan, 2012) hlm. 129.

bertentangan dengan jenis pemerintahan dalam Islam. Islam berpaham bahwa kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah. Yang berhak membuat hukum adalah Allah dan Rasul-Nya. Jadi manusia hanya sebagai pelaksana dari hukum-hukum yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana sudah tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam posisi seperti ini, khalifah hanya berperan sebagai penerjemah terhadap hukum-hukum tertentu dan menegakkannya untuk kemaslahatan umat manusia. Konstruksi HTI tentang demokrasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari kerangka dasar berpikinya bahwa hubungan antara agama dan politik atau agama dan negara bersifat intergralistik. Menurut Zallum, tidak ada pemisahan agama dari negara, tidak ada pemisahan agama dari persoalan-persoalan duniawi sebagaimana peradaban Barat yang kafir.<sup>12</sup>

HTI masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan. Kehadiran HTI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada 1953. Kehadirannya sebagai gerakan politik memang mengusung panji penegakan sistem khilafah al-Islamiyah.

Ide ini memunculkan konsekuensi bahwa gerakan Hizbut Tahrir yang awalnya merupakan partai politik di Palestina menyebar dan punya sifat lintas negara. Secara garis besar, tujuan Hizbut Tahrir adalah menghidupkan konsep

---

<sup>12</sup> David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, *Rediscovering the Religious Factor in American Politics*, diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, *Agama dalam Politik Amerika* (Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2006). hlm.8



politik yang diklaim merupakan kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad sampai kejatuhan imperium Utsmani (Abad ke-18 Masehi). Menurut pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya di kitab *Daulah Islam* dan kitab *Mafahim Hizbut Tahrir* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007, generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam. Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Bagi Taqiyuddin, ini adalah kemunduran besar kaum muslimin. Taqiyuddin mengistilahkannya dengan *ghazwu ats-tsaqafi* (invasi budaya) yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka.

Ide *Daulah Islamiyah* (Negara Islam) di Indonesia memang sempat muncul saat Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DI/TII di masa pasca-kemerdekaan. Belakangan dalam bentuk yang berbeda, ia juga muncul dalam bingkai gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Hanya saja keduanya masih menerapkan atau mengakui batas-batas negara dengan mengganti sistem maupun dasar pemerintahan saja. Sedangkan Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita yang menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa. Konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata “Khilafah” dan “Negara” secara bergantian. Bangsa dalam konsep “negara-bangsa” bagi gerakan ini adalah

“Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir). Di dalam dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir. Dibandingkan dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, usia Hizbut Tahrir Indonesia memang masih sangat muda. Masuk pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan yang punya anggota cukup banyak saat ini.

Tidak hanya HTI, di Indonesia Penolakan Demokrasi juga dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). pada 2002, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “*Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” dengan menambahkan “*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” seperti yang tertera pada butir pertama Piagam Jakarta.

Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila ini, yang kemudian menjadi wacana pemerintah untuk membubarkan FPI pada 2006, demi menghindari kekhawatiran akan memecah-belah kesatuan bangsa dan negara.<sup>13</sup>

Salah satu persoalan yang dihadapi konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah adanya gerakan-gerakan Islam diatas yang seringkali menjalankan aksinya dengan melanggar aturan main demokrasi. Tidak hanya itu, tetapi dapat

---

<sup>13</sup> Maria Safitri, Izin Hampir Habis Ini Fakta Menarik FPI, IDN Times edisi 13 Mei 2019. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/izin-hampir-habis-ini-fakta-fakta-menarik-tentang-fpi/full> (diakses 20 Juli 2019)

disaksikan bahwa konsepsi pemikiran dari kalangan mereka juga menentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri sebagai sebuah aturan main yang telah disepakati bersama. Meskipun demikian, gerakan Islam radikal atau fundamentalis sama sekali bukan representasi dari umat Islam Indonesia pada umumnya.

Mayoritas umat Islam Indonesia, setidaknya adalah sebagaimana tercermin dalam garis politik berbagai organisasi masa terkemuka seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya diketahui berhaluan moderat. Dengan demikian, kekhawatiran yang terlalu berlebihan terhadap gerakan-gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di negeri ini, sebenarnya tidak cukup beralasan walaupun tetap harus diwaspadai.

Beberapa kajian telah membuktikan, bahwa sikap kelompok ini biasanya anti terhadap semua sistem Barat, khususnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, anehnya mereka menikmati berbagai hasil teknologi Barat. Di mata mereka, demokrasi dan hak-hak asasi manusia adalah produk Barat sehingga harus dilawan karena merusak Islam. Mereka ingin menciptakan sebuah dunia cita-cita berdasarkan tafsiran mereka yang monolitik terhadap Al-Qur'an dan sejarah Nabi. Kelompok ini juga tersebar hampir di seluruh Dunia Islam yang pada umumnya berideologi tunggal ingin mengubah dunia secara berani dan cepat, sekaligus dibayar dengan darah. Sebenarnya, kelompok ini tidak punya gagasan peradaban yang jelas, tetapi relatif terikat oleh ideologi tunggal yang fasistis. Sebaliknya, kelompok moderat pada umumnya menerima dan membela demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Mereka tidak risau apakah gagasan itu berasal dari Barat atau Timur. Selama prinsip-prinsip itu mendukung cita-cita Al-

Qur'an bagi tegaknya keadilan, perdamaian, moralitas, dan hubungan baik sesama umat manusia, mengapa harus ditolak.<sup>14</sup>

Penting ditegaskan bahwa Demokrasi dan Pancasila adalah landasan dan dasar yang sangat cocok agar Indonesia tetap berdiri dengan kokoh. Pancasila adalah dasar yang apik dan telah teruji kebenarannya untuk melandasi suatu negara yang masyarakatnya beragam suku dan keyakinan. Ingat bahwa ketika para pendiri bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara bukannya tanpa sebab, tetapi ini adalah pilihan yang paling tepat setelah mengadakan kajian dengan melihat secara teliti dan kontekstual kondisi Indonesia yang sebenarnya. Akhirnya, mereka bersepakat untuk bersatu dalam perbedaan dan Pancasila sebagai landasan dan paradigmanya. Untuk itu, gerakan dan ideologi apa pun yang tumbuh di Indonesia jika tidak sesuai dengan tujuan Pancasila maka harus dilawan. Keberadaan ormas tersebut misalnya, jika gerakan mereka membahayakan Demokrasi dan Pancasila maka harus diluruskan dan tidak menutup kemungkinan untuk diperangi. Semestinya mereka harus sadar bahwa mereka adalah hidup di Indonesia yang diketahui masyarakatnya plural. Ideologi Islam yang mereka pegangi semestinya perlu ditafsirkan ulang, bahwa sebenarnya Islam bukan suatu penghalang untuk dapat hidup harmonis bersanding dengan Demokrasi Pancasila. Intinya, bahwa praktik keislaman yang mengambil jalan garis keras perlu untuk didiskusikan kembali tentang kebenarannya.

Dalam menanggapi ormas-ormas yang anti demokrasi tersebut, Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

---

<sup>14</sup> M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 358.

Mengambil tindakan tegas dengan membubarkan HTI sebagai ormas anti demokrasi yang dapat memecah belah banyak umat di Indonesia.

## **5. Instagram dan Propaganda Anti Demokrasi**

### **1. Gambaran betuk perdebatan wacana sistem politik khilafah dan demokrasi di Indonesia.**

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst.<sup>15</sup>

Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajara Islam itu adalah: *as-syura, al-'adalah, al-amanah, al-masuliyyah dan al-hurriyyah*. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan khulafaur rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam (Barat). Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekular. Oleh sebab itu statement Fukuyama maupun Huntington, yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak

---

<sup>15</sup> Umar, Nasaruddin. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis" dalam Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta, Vol. V. No. 12002. hlm. 36

compatible dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar. Sebab di negara non-Muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan.<sup>16</sup>

Demokrasi ialah sistem Pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Seperti perkataan John L. Esposito bahwa “demokrasi pada dasarnya ialah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif, maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada sistem demokrasi yang semacam ini, masyarakat dapat berperan mengontrol terhadap kebijakan yang diambil dengan adanya transparansi dari pemerintahan. Namun disisi lain demokrasi juga dapat memunculkan tirani mayoritas terhadap minoritas, ujungnya suara terbanyaklah yang akan diambil dalam setiap kebijakan.

Dampak utama dari reformasi adalah kebebasan dalam menyampaikan aspirasi tidak lagi dikekang seperti yang terjadi pada masa orde baru. Kebebasan menyalurkan aspirasi bagi pemerintahan, baik berupa pendapat maupun kritik. padahal kebebasan dalam beraspirasi tersebut harus tetap mengikuti norma-norma yang berlaku dan dapat di pertanggung jawabkan dan berguna bagi kemajuan bangsa, jangan sampai pendapat atau aspirasi yang kita sampaikan malah memecah belah persatuan bangsa.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat melanda pada ranah bernegara. ide khilafah menjadi santer sebagai upaya yang dianggap dapat menggantikan

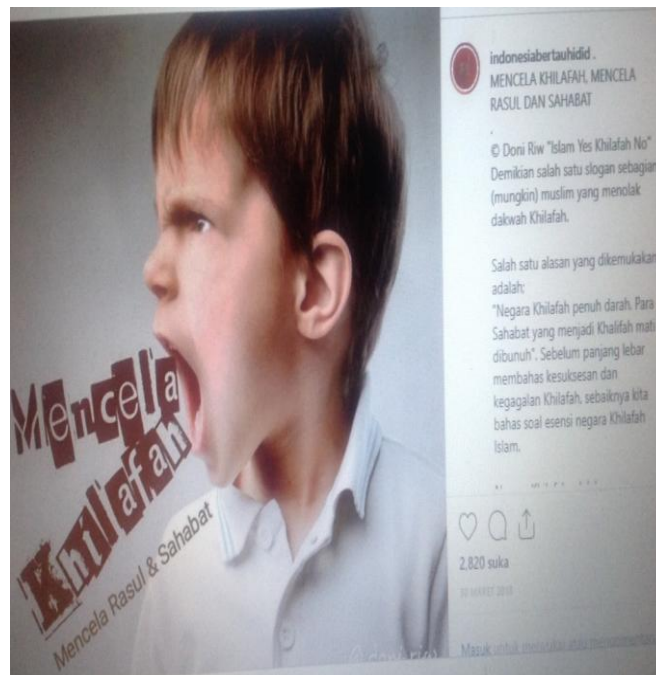
---

<sup>16</sup> Bahtiar Effendy, “Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan” dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta, 1996, Mizan, hlm. 100.

dasar negara dan model berbangsa. Jika reformasi dimaknai keterbukaan, maka aktivis khilafah dengan jitu memanfaatkan kesempatan untuk menumpanginya, bukan untuk bersama-sama mengarungi samudra demokrasi, melainkan pembentukan khilafah Islamiyah. Fenomena gerakan khilafah ini baru muncul di Indonesia sekitar tahun 90-an. Aktivis Khilafah saat masuk dan menyebarkan pemikirannya di Indonesia berhadapan dengan negara yang sudah mapan. Oleh sebab itu konsepsi politik Hizbut Tahrir Indonesia tentang khilafah, perlu mendapat perhatian.

Perdebatan mengenai penerapan sistem khilafah ini, ramai melalui media sosial masyarakat Indonesia, bermunculan akun-akun yang mengatasnamakan ‘Tauhid’ salah satunya dapat dilihat pada akun Instagram @indonesiabertauhidid yang memiliki banyak unggahan yang menimbulkan banyak perdebatan mengenai sistem khilafah ini antara akun satu sama lain. Salah satunya bisa dilihat dalam unggahan berikut:

**Gambar 2.3** Unggahan dari Akun Instagram @indonesiabertauidid



**MENCELA KHILAFAH, MENCELA RASUL DAN SAHABAT**

*@Indonesiabertauidid : © Doni Riw "Islam Yes Khilafah No" Demikian salah satu slogan sebagian (mungkin) muslim yang menolak dakwah Khilafah. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah; "Negara Khilafah penuh darah. Para Sahabat yang menjadi Khalifah mati dibunuh". Sebelum panjang lebar membahas kesuksesan dan kegagalan Khilafah, sebaiknya kita bahas soal esensi negara Khilafah Islam. Negara Khilafah adalah negara yang meletakkan kedaulatan hukum pada Syari'at Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu. Beliau menjadikan Syariat Islam sebagai kedaulatan hukum di Madinah. Kemudian beliau tampil sebagai pemimpinnya. Seluruh umat Islam tau, bahwa Rasulullah adalah uswatun khasanah. Karenanya, para Sahabat radhiyallahu anhum meneladani Rasulullah. Melanjutkan kedaulatan dan pemerintahan Islam dalam bentuk negara Khilafah Rasyidah. Tak ketinggalan*



*para Tabi'in dan Tabi'it Tabiin. Mereka meneladani praktik kenegaraan Rasulullah dalam wujud Khilafah Bani Umayyah dan Khilafah Bani Abasiyah. Tak ketinggalan generasi berikutnya dalam bentuk Khilafah Turki Usmani. Mencela konsep Khilafah, mengatakan bahwa Khilafah yang dipraktikkan oleh para Sahabat, Tabiin, dan Tabiit tabiin penuh darah dan kekejaman, adalah mencela para Sahabat itu sendiri. Betapa sombongnya kita berani mencela Ijma Sahabat menegakkan Khilafah Rasyidah? Sedangkan Allah saja meridhoi mereka. Alangkah tak tau dirinya kita mencela sistem Khilafah telah melindungi dan membesarkan para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dll. Tak pernah sedetikpun generasi emas Islam menerapkan kedaulatan rakyat. Khalifah Abu Bakar memang dipilih majelis, Khalifah Usman dan Ali memang dipilih umat. Tetapi kedaulatan hukum tetap di tangan syara'. Khilafah Islam memang memiliki dewan Syuro, tetapi mereka tidak membuat hukum. Tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan hari ini, sebagian muslim menukar hukum Allah dengan hukum warisan kolonial. Sembari mencela Khilafah yang dipraktikkan para kekasih Allah. Na'udzubillahi mindzalik.*

Unggahan tersebut tentunya mengundang berbagai macam bentuk perdebatan yang diungkapkan oleh para pengguna *instagram* lainnya. Diantaranya ada yang menentang dan banyak juga yang menyetejuinya. Komentar menentang diberikan oleh @muhamad.ajip *Bani Umayyah dan Abbasiyah meneladani Rasulullah SAW apakah dengan sepenuhnya?* @indonesiabertauhidid. Perkataan @muhamad.ajip ini banyak sekali mengalami respons kontra diantaranya: @mzainul\_fikri: *luar biasa, ternyata demokrasi lebih sesuai dengan ajaran*

*Rosulullah dibanding Khilafah ya?? kalau gitu dikitab fiqih harusnya Bab demokrasi , Bukan bab Khilafah.*

Ujaran kebencian lainnya atas komentar tersebut diberikan oleh @muhammadrio1453 : *Yg mencela khilafah, org kafir, liberal, sekuler, sama munafik saja.. Gaada yg lain..*

Perdebatan lainnya mengenai konsep wacana sistem khilafah dan demokrasi Indonesia, tidak hanya terjadi di Instagram, namun juga di tiwtter mantan Ketua Mahkamah Konstitusi @MahfudMD yang mengunggah perkataan:

#### **Gambar 2.4 Unggahan dari Akun Twitter @mohmahfudmd**



Perdebatan antara pengguna pun tak dapat terelakkan, banyak yang menyayangkan pendapat Mahfud MD tersebut namun tidak sedikit yang mendukung. Dukungan datang dari pemilik akun @haruniatxpp “*begitulah HTI, Maka ada yang beranggapan bahwa ide itu tidak masuk akal*” ujarinya.

Kemudian jika dibandingkan dengan balasan dukungan, unggahan ini juga tidak dikalahkan dengan banyaknya yang menentang, diantaranya komentar dari pemilik akun: @widodoyunie: *Prof perlu buka-buka lagi deh tentang khilafah. Jummur umul Khilafah adalah wajib ditegakkan.*

Perdebatan tidak hanya melalui media sosial, perdebatan antara HTI dan PBNU juga terjadi pada saat siaran tv sedang berlangsung dalam stasiun JakTV dan diunggah oleh akun youtube @DakwahJateng. Pada acara tersebut PBNU yang diwakilkan oleh Wasekjennya meminta wakil HTI untuk menunjukkan dalil al-qur'an mengenai dasar diwajibkannya *Khilafah* dalam dalil Al-qur'an. Dengan sedikit terbata perwakilan HTI menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

Dukungan dan celaan pun datang dari pengguna Youtube lainnya ada yang mendukung HTI dan mencela PBNU, pun sebaliknya. Celaan tersebut diantaranya;

@Amran1974: *Waksekjen PBNU terlalu PD dan emosian, dipatahkan dengan dalil tafsir qurthubi akhirnya keok minta debat diluar karna malu. Makanya*

*jangan cepat menyalahkan dulu kalau belum tabayyun dulu, asal usulnya HTI itu bagaimana..dalam madzhab s3perti apa..pandangan politiknya seperti apa dg ajaran islam.Tapi itulah kalau udah menjadi pesanan "rezim".*

*@syamsulrijal: jubir HTI ga' tau basic pendidikan agamanya dari mana sedangkan PBNU tentu dari pesantren..*

Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita yang menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa. Konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata “Khilafah” dan “Negara” secara bergantian. Bangsa dalam konsep “negara-bangsa” bagi gerakan ini adalah “Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir).

Di dalam dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir. Dibandingkan dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, usia Hizbut Tahrir Indonesia memang masih sangat muda. Masuk pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan yang punya anggota cukup banyak saat ini

Belakangan ini keberadaan HTI dianggap ancaman karena akan mengubah ideologi Pancasila. Salah satu ormas yang menyuarakan pembubaran tersebut

adalah GP Ansor, ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Hari ini, secara resmi pemerintah mengambil sikap tegas terhadap keberadaan HTI tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah akan membubarkan organisasi tersebut untuk mengarahkannya agar sesuai dengan koridor Undang-Undang Ormas yang berlaku di Tanah Air.

Pada akhirnya, HTI sebagai ormas anti Demokrasi di Indonesia berhasil dibubarkan Pemerintah pada bulan Mei 2017. Berikut pernyataan Menkopolhukam Bapak Wiranto:<sup>17</sup>

“Siang ini kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang mempelajari ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu. Untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan dalam UU keormasan baik dalam masalah tujuan ciri dan asas. Semuanya harus menuju satu titik yakni berdasarkan ideologi negara, Pancasila.”. Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI ini, yaitu:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4. Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.

---

<sup>17</sup> Ahmad Khadafi, Sejarah Kemunculan HTI hingga akhirnya dibubarkan, <https://tirto.id/sejarah-kemunculan-hti-hingga-akhirnya-dibubarkan-coiC> (diakses 20 Juli 2019)

5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.”

Dengan dibubarkannya HTI, Selain itu, Wiranto menjelaskan bahwa eksistensi HTI sebagai organisasi sudah tidak perlu diperdebatkan. Sebab, HTI sudah secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. HTI dibubarkan sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Meski begitu, dia mengatakan aktivis HTI masih diperbolehkan beraktivitas untuk kegiatan keagamaan maupun sosial. Selama kegiatan itu tidak mengarah kepada perbincangan yang justru bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

## **2) Propaganda yang dilakukan oleh akun instagram @Felix.Siauw dalam mendukung penerapan politik khilafah dan menentang demokrasi di Indonesia.**

Dalam Ensiklopedia Internasional dikatakan, propaganda suatu jenis komunikasi yang berusaha memengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan.<sup>18</sup> Propaganda mengenai sistem khilafah pada media sosial *instagram* dapat ditemukan salah satunya melalui akun instagram @**Felix.Siauw**

Instagram Felix Siauw yang pada saat ini memiliki 944 ribu Followers dan sudah memposting sebanyak 1.557 Unggahan Untuk menganalisis positngan Felix Siauw tentang Propaganda HTI dan anti demokrasi, maka penulis hanya mengeksplere beberapa postingan yang berhubungan dengan politik. bentuk

---

<sup>18</sup> Helena Olii, *Opini Publik*, (Jakarta: Indeks), 2007, hlm.38

dakwah Felix adalah “Islamisme cair” dimana penggabungan antara pesan dakwah dengan gagasan yang radikal dibalut dengan gambar-gambar pesan yang kreatif. Dalam Islamisme kontenporer hal yang berupa sensasi dan estetika yang digunakan gerakan Islamis untuk membuat HTI semakin diminati dalam kalangan Muslim muda. Unggahan-unggahan akun @Felix.Siauw yang membela HTI, mengkritik pemerintahan negeri mengemukakan kata-kata propaganda politik termuat dalam beberapa unggahannya, antara lain:

**Gambar 2.5 Unggahan dari Akun Instagram @Felix.siauw**



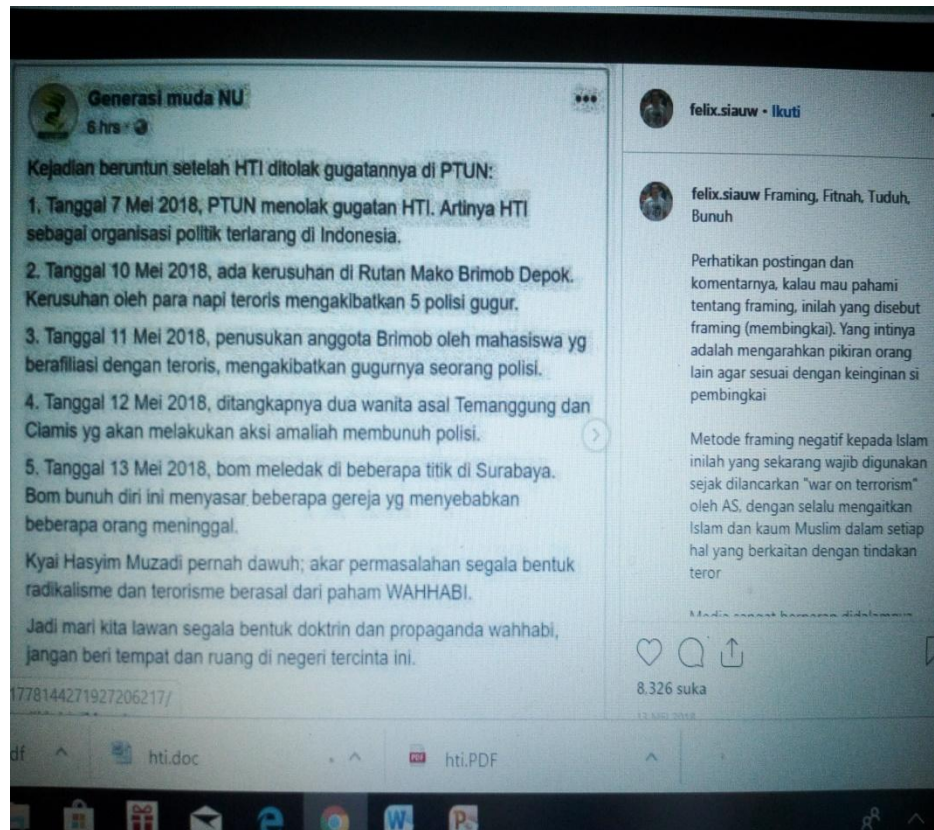
“Model toleransi gaya mereka yang suka teriak NKRI harga mati, dan merasa paling pancasilais, but I still love you brothers from the deepest of my heart Saya hanya bisa terus doakan, semoga Allah lapangkan rezekimu, buka hatimu hingga hidayah Allah berkelempahan masuk, diberkahi keluarga dan nafkahnya Alhamdulillah Ramadhan, sekalian brother, boikot, batalkan dan gantikan seluruh jadwal saya di Ramadhan ini, biar hidup saya lebih santai dikit Informasi buat temen-temen semua, yang dibalik ini, masih orang-orang yang sama yang pro penista agama, itu-itu aja..”

Unggahan diatas, merupakan salah satu bentuk propaganda menggunakan tehnik *Glittering Generalities* (**Sebutan muluk-muluk**). Teknik propaganda sebutan yang muluk-muluk adalah suatu teknik dalam hal ini adalah dengan mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu kata bijak yang digunakan untuk membuat kita menerima dan menyetujui hal tersebut tanpa memeriksa terlebih dahulu. Jika dibandingkan dengan teknik umpatan yang menggunakan katakata kasar dan berkonotasi negatif, dalam teknik ini menggunakan kata-kata sanjungan, kata muluk-muluk atau berkonotasi pasif.

Kata-kata bijak digunakan namun berkonotasi pasif, mengarah dan menuduh kepada kaum tertentu yaitu kaum yang menjunjung NKRI dan pancasila namun memakai kata-kata sanjungan dan doa.



**Gambar 2.6** Unggahan dari Akun Facebook @Generasi Muda NU dan Instagram @Felix.siauw



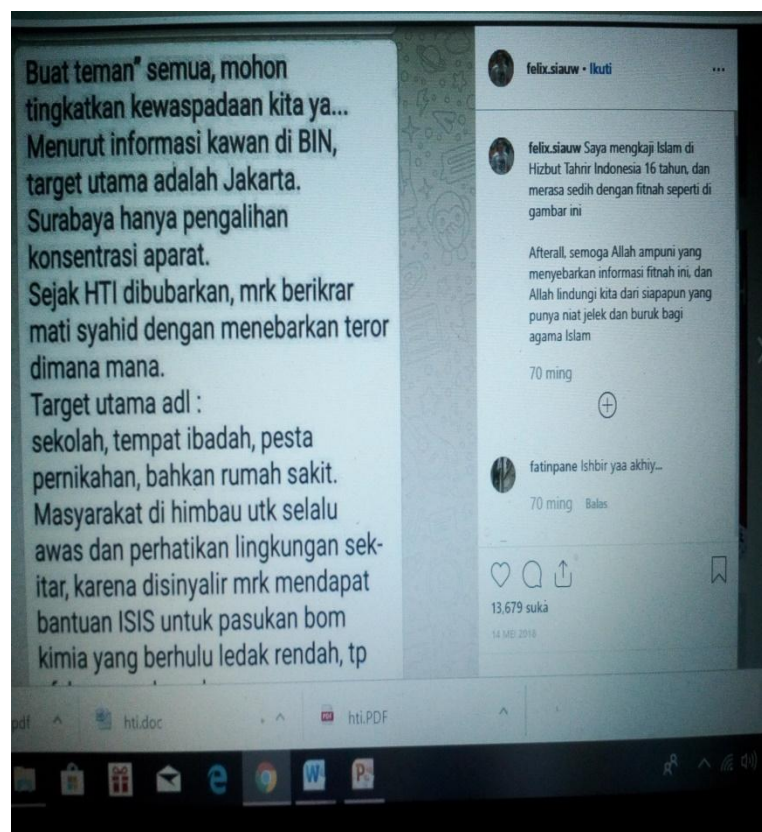
Unggahan gambar yang memuat kata-kata dari akun Generasi Muda NU yang menuduh HTI sebagai WAHHABI, dibela Felix Siauw melalui kata-kata:

“Framing, Fitnah, Tuduh, Bunuh Perhatikan postingan dan komentarnya, kalau mau pahami tentang framing, inilah yang disebut framing (membangkai). Yang intinya adalah mengarahkan pikiran orang lain agar sesuai dengan keinginan si pembangkai Metode framing negatif kepada Islam inilah yang sekarang wajib digunakan sejak dilancarkan "war on terrorism" oleh AS, dengan selalu mengaitkan Islam dan kaum Muslim dalam setiap hal yang berkaitan dengan tindakan teror Media sangat berperan didalamnya. Tiap ada tindakan kriminal

yang melibatkan Muslim selalu disebut "jihad", "bom syahid", dan berubah menjadi "gunmen", "psikopat", "orang gila" ketika pelakunya bukan Muslim. Pokoknya Islam harus dicitrakan jelek. Dalam kasus teror bom di Surabaya ini, nyata sekali ada framing dari pihak tertentu kepada pihak lainnya, dan framing ini sudah tidak lagi peduli, mana fitnah mana fakta, pokoknya tuduh, kalau bisa bunuh. Jadi mereka bisa melegakan sesuatu yang keji dengan alasan "anti-terorisme" atau "menjaga kedamaian". Begitulah sejak dulu, yang dilakukan AS, gurunya. Parahnya orang-orang yang keji akal dan busuk perangai ini berlindung di bawah nama besar NU untuk melegitimasi perbuatan kotornya. Saya pikir kalau NU tidak mengambil tindakan tegas, lama kelamaan akan dianggap bahwa NU saat ini memang sedang ditunggangi oknum-oknum yang membenci Islam dan nyata-nyata merusak ukhuwah Islam. Padahal para Kyai NU yang saya kenal, semua ikhlas, tak mudah menuduh, apalagi memfitnah, bahkan ada yang diantara Kyai yang saya kenal, mereka sangat hati-hati dalam perkara kebaikan apalagi dalam perkara keburukan. Tapi para penumpang nama NU, mereka yang keji ini, mereka inilah yang nyata-nyata memecah belah ummat, memecah bangsa, yang selalu memprovokasi dan mengancam, mempersekusi dan memfitnah. Saya jadi ingat cara-cara beringas seperti ini saat membaca sejarah negeri ini. Persis sekali, dulu pernah ada kelompok yang mengaku paling nasionalis, paling cinta NKRI, tapi caranya beringasan dan paling anti agama. Kita doakan semoga orang-orang ini taubat. Ditengah tragedi seperti ini, kok masih tega-teganya memanfaatkan untuk framing negatif. Atau jangan-jangan memang... Ah, sudahlah..”

Unggahan ini menggunakan teknik propaganda *Testimonials* (**pemberian kesaksian**). *Testimonials* dalam unggahan diatas merupakan teknik propaganda yang berisi perkataan orang yang dibenci bahwa ide atau program adalah buruk melalui kata-kata “Persis sekali, dulu pernah ada kelompok yang mengaku paling nasionalis, “*paling cinta NKRI, tapi caranya beringasan dan paling anti agama*” seolah memberikan kesaksian seolah membenci para pencinta NKRI.

**Gambar 2.7 Unggahan dari Akun Instagram @Felix.siauw**

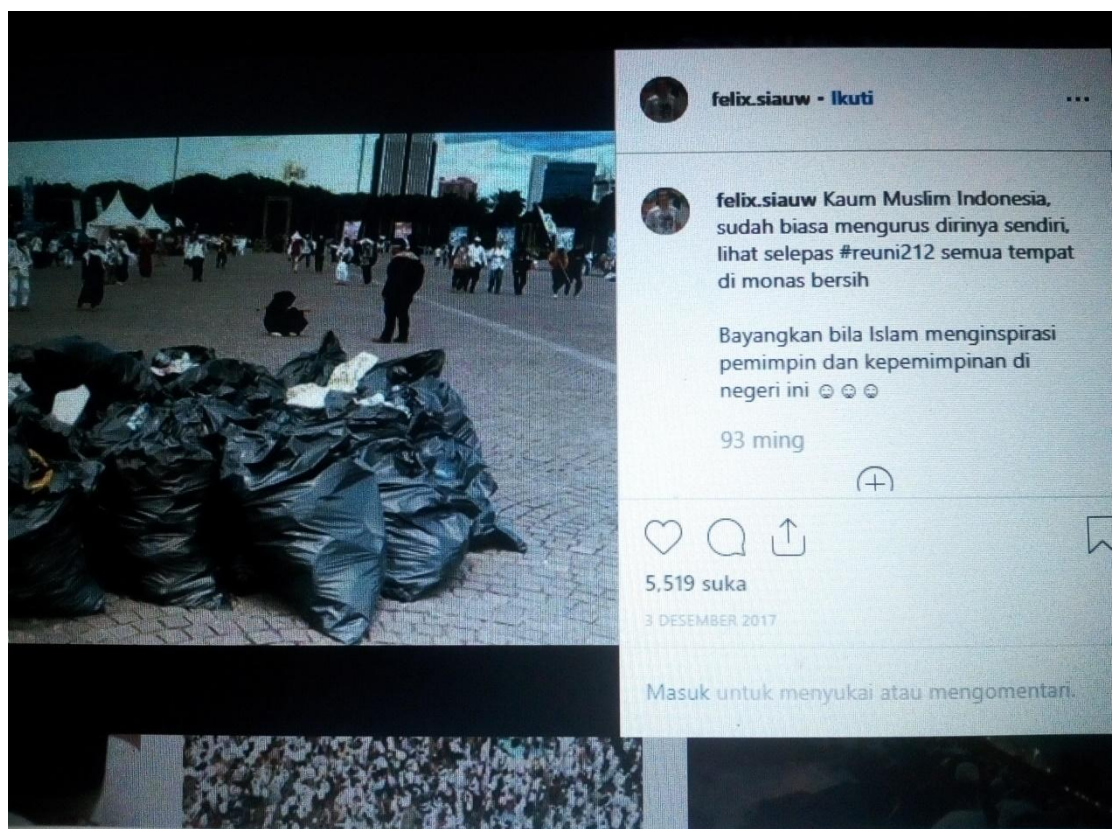


Kemudian, akun @Felix.Siauw kembali mengunggah gambar yang memuat kata-kata negatif atas HTI, kemudian membelanya dengan kata-kata:

“Saya mengkaji Islam di Hizbut Tahrir Indonesia 16 tahun, dan merasa sedih dengan fitnah seperti di gambar ini. Setelah, semoga Allah ampuni yang menyebarkan informasi fitnah ini, dan Allah lindungi kita dari siapapun yang punya niat jelek dan buruk bagi agama Islam.”

Unggahan ini menggunakan teknik propaganda *Using all forms of persuasion* (penggunaan semua persuasi). *Using all forms of persuasion* dapat diartikan sebuah teknik yang menggunakan semua bentuk persuasi. Teknik ini sering digunakan dengan sengaja mengajak dan membimbing untuk memengaruhi dan membujuk orang guna menerima suatu pandangan, sentimen, atau nilai melalui kesaksian @felix.siauw.

Gambar 2.8 Unggahan dari Akun @Felix.siauw



Unggahan ini diikuti dengan kata-kata :

*“Kaum Muslim Indonesia sudah biasa mengurus dirinya sendiri, lihat selepas #reuni212 semua tempat bersih. Bayangkan bila islam menginspirasi pemimpin dan kepemimpinan negeri ini”*

Teknik yang digunakan dalam unggahan ini adalah *Card Stacking* (menonjolkan hal-hal baik). *Card Stacking* adalah penumpukan fakta yang meliputi seleksi dan kegunaan fakta terhadap suatu pernyataan agar memberikan kemungkinan terbaik untuk suatu bujukan yang dilakukan. Teknik ini hanya menonjolkan hal-hal yang baik saja sehingga publik hanya melihat hanya satu sisi, dalam hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang didasarkan islam (dalam hal ini khilafah) adalah baik.

Pada kenyataannya, akun-akun pengguna *instagram* penyebar kebencian, Propaganda Politik dan anti demokrasi bukan hanya akun @Felix.Siauw saja, masih banyak akun-akun lain yang bertebaran di Media Sosial baik itu *Facebook*, *Twitter* maupun *instagram*. Masyarakat harus dituntut lebih hati-hati dalam mendapatkan berita, tidak terpancing emosi yang dapat memecah-belah persatuan NKRI.